



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa untuk memenuhi asas manfaat, mengakomodir dinamika pembangunan, dan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes diperlukan Rencana Tata Ruang yang menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 23. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 25. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190)
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Rencana Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

30. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
33. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
34. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
35. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
38. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
39. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
40. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
41. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
42. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai.
43. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
44. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

46. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
47. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
51. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
52. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
53. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
54. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
55. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
56. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
58. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
59. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
60. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

61. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
62. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
63. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
64. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
66. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
67. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
68. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
69. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
70. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
71. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
72. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
74. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

76. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
77. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Brebes dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
78. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Brebes mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Brebes meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 175.904,57 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat koma lima tujuh) hektar yang terletak diantara 6^o44' dan 7^o21' Lintang Selatan dan antara 108^o41' dan 109^o11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap; dan
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan yang meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;

- f. Kecamatan Tonjong;
- g. Kecamatan Larangan;
- h. Kecamatan Ketanggungan;
- i. Kecamatan Banjarharjo;
- j. Kecamatan Losari;
- k. Kecamatan Tanjung;
- l. Kecamatan Kersana;
- m. Kecamatan Bulakamba;
- n. Kecamatan Wanasari;
- o. Kecamatan Songgom;
- p. Kecamatan Jatibarang; dan
- q. Kecamatan Brebes.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. kebijakan rencana kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
 - b. peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
 - c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain.
- (4) Kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya
- (5) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.
- (6) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pemantapan kawasan pertanian terpadu; dan
 - d. pengembangan industri berbasis potensi lokal.
- (7) Kebijakan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
 - b. pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi;
 - c. pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Strategi Kebijakan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan; untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - c. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat perkotaan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
- (2) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (3) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan dan rel sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
 - b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
 - c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
 - d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumberdaya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Strategi Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
 - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- (2) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - b. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
 - d. menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. mendorong kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (5) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
 - e. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan

- mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumberdaya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.
- (6) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pemantapan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten;
 - b. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) persen;
 - c. memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
 - d. meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (7) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan
 - c. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Paragraf 3

Strategi Kebijakan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan kawasan jalan arteri primer (Pantura) yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang);
 - d. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, meliputi:

- a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan cagar budaya untuk mempertahankan kearifan lokal;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya melalui gelar budaya dan pengembangan kota pusaka; dan
 - c. peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya melalui perbaikan infrastruktur pada kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya.
- (3) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. memelihara dan melindungi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola.
- (4) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf d, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan; dan
 - b. mengendalikan faktor-faktor atau ancaman yang dapat merusak fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Brebes;
 - b. Kawasan Perkotaan Ketanggungan - Kersana;
 - c. Kawasan Perkotaan Bumiayu; dan

- d. Kawasan Perkotaan Losari.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Bulakamba;
 - b. Kawasan Perkotaan Jatibarang;
 - c. Kawasan Perkotaan Tanjung;
 - d. Kawasan Perkotaan Larangan;
 - e. Kawasan Perkotaan Banjarharjo;
 - f. Kawasan Perkotaan Tonjong;
 - g. Kawasan Perkotaan Sirampog;
 - h. Kawasan Perkotaan Bantarkawung;
 - i. Kawasan Perkotaan Salem;
 - j. Kawasan Perkotaan Wanasari
 - k. Kawasan Perkotaan Paguyangan; dan
 - l. Kawasan Perkotaan Songgom.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Desa Sidamulya dan Desa Sawojajar di Kecamatan Wanasari
 - b. Desa Paguyangan, Desa Pegojengan, dan Desa Wanatirta di Kecamatan Paguyangan;
 - c. Desa Jatirokeh di Kecamatan Songgom;
 - d. Desa Bentar di Kecamatan Salem;
 - e. Desa Kaliwadas di Kecamatan Bumiayu;
 - f. Desa Kalilangkap di Kecamatan Bumiayu
 - g. Desa Dawuhan di Kecamatan Sirampog;
 - h. Desa Sindangwangi di Kecamatan Bantarkawung;
 - i. Desa Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 - j. Desa Sitanggal dan Desa Pamulihan di Kecamatan Larangan;
 - k. Desa Cikeusal Kidul dan Desa Baros di Kecamatan Ketanggungan;
 - l. Desa Bandungsari dan Desa Cikakak di Kecamatan Banjarharjo;
 - m. Desa Bojongsari di Kecamatan Losari;
 - n. Desa Banjaratma di Kecamatan Bulakamba;
 - o. Desa Kalipucang di Kecamatan Jatibarang; dan
 - p. desa-desa lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah.
- (5) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. pengembangan jalan desa;
 - e. pengembangan jalan khusus;
 - f. terminal penumpang;
 - g. terminal barang; dan/atau
 - h. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional, meliputi:
 1. ruas jalan Losari (batas Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah) - Pejagan;
 2. ruas jalan Pejagan - Batas Kota Brebes;
 3. ruas jalan Pemuda;
 4. ruas jalan Diponegoro;
 5. ruas jalan Ahmad Yani;
 6. ruas jalan Sudirman;
 7. ruas jalan Gajah Mada;
 8. ruas jalan Pejagan - Simpang Tiga Tol Pejagan - Kanci;
 9. ruas jalan lingkaran Kota Tegal - Brebes; dan
 10. ruas jalan arteri primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.
 - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi, meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Tiga Tol Pejagan - Kanci - Ketanggungan (Batas Kabupaten Tegal);
 2. ruas jalan Batas Kabupaten Tegal / Kabupaten Brebes - Prupuk;
 3. ruas jalan Prupuk - Batas Kabupaten Tegal / Kabupaten Banyumas;
 4. ruas jalan Lingkaran Bumiayu; dan
 5. ruas jalan kolektor primer satu (JKP) 1 lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.
 - c. jalan tol, meliputi:
 1. ruas jalan tol Pejagan - Pemalang;
 2. ruas jalan tol Pejagan - Kanci; dan
 3. ruas jalan tol Pejagan - Cilacap.

- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota, meliputi:
 1. ruas jalan Jatibarang/Batas Kabupaten Tegal - Ketanggungan;
 2. ruas jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari;
 3. ruas jalan Kersana - Bandungsari;
 4. ruas jalan Bandungsari - Penanggapan/Batas Provinsi Jawa Barat;
 5. ruas jalan Bandungsari - Salem;
 6. ruas jalan Bumiayu - Salem;
 7. ruas jalan Cilopadang - Salem;
 8. ruas jalan Bumiayu - Sirampog; dan
 9. ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
 - b. rencana pengembangan jalan provinsi, meliputi:
 1. peningkatan ruas jalan Tanjung - Kersana;
 2. peningkatan ruas jalan lingkaran Ketanggungan - Bulakelor;
 3. peningkatan ruas jalan Kaligadung - Benda;
 4. peningkatan ruas jalan Pasirpanjang - Wanoja; dan
 5. peningkatan ruas jalan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar - ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, meliputi:
 1. peningkatan ruas jalan Brebes - Jatibarang; dan
 2. peningkatan ruas jalan kolektor primer empat (JKP) 4 lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan lokal primer, meliputi:
 1. seluruh ruas jalan Kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan kolektor primer empat (JKP) 4 dan jalan strategis kabupaten yang termuat dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 2. pengembangan ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
 - c. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan ruas jalan Limbangan Wetan - Randusanga Kulon;
 2. pengembangan ruas jalan Randusanga Kulon - pantai;
 3. pengembangan ruas jalan Klampok - Sawojajar;
 4. pengembangan ruas jalan Sawojajar - Pandansari;
 5. pengembangan ruas jalan Terlangu - Kalipucang;
 6. pengembangan ruas jalan Cikakak - Cibendung;
 7. pengembangan ruas jalan Cikakak - Banjarharjo;
 8. pengembangan ruas jalan Kretek - Kaligua;
 9. pengembangan ruas jalan Brebes - Sigempol;
 10. pengembangan ruas jalan Bulakamba - Pulolampes;
 11. pengembangan ruas jalan Ahmad Dahlan;
 12. pengembangan ruas jalan Hasyim Asyari;

13. pengembangan ruas jalan poros tengah (ruas Jalan Klampok - Sitanggal, Sitanggal - Larangan, Larangan - Pamulihan, Pamulihan - Jemasih, Jemasih - Bangbayang);
 14. pengembangan ruas jalan Pamulihan - Wlahar;
 15. pengembangan ruas jalan Talok - Maribaya;
 16. pengembangan ruas jalan lingkaran industri Brebes - Tegal (ruas Kecipir - Blangko - Klampok); dan
 17. pengembangan ruas jalan strategis lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kabupaten yang kewenangannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengembangan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan lainnya.
 - (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, meliputi:
 1. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Bumiayu; dan
 2. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Tanjung.
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi:
 1. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Bumiayu;
 2. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Jatibarang;
 3. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Banjarharjo;
 4. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Larangan;
 5. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Ketanggungan;
 6. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Brebes;
 7. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Losari; dan
 8. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Salem.
 - (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berada di Kecamatan Losari.
 - (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berada di Kecamatan Tanjung.
 - (11) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api
 - b. stasiun kereta api
 - (12) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
 - a. jalur lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta - Surabaya;
 - b. jalur tengah menghubungkan Kroya - Purwokerto - Prupuk - Cirebon;
 - c. pembangunan jalur kereta cepat Jakarta - Surabaya; dan
 - (13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun penumpang, meliputi:
 1. Stasiun Terpadu Bulakamba di Kecamatan Bulakamba
 2. Stasiun Brebes di Kecamatan Brebes;
 3. Stasiun Tanjung di Kecamatan Tanjung;
 4. Stasiun Ketanggungan Barat di Kecamatan Kersana;
 5. Stasiun Ketanggungan di Kecamatan Ketanggungan;
 6. Stasiun Larangan di Kecamatan Larangan;

7. Stasiun Songgom di Kecamatan Songgom;
 8. Stasiun Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 9. Stasiun Bumiayu di Kecamatan Bumiayu;
 10. Stasiun Kretek di Kecamatan Paguyangan;
 11. Stasiun Patuguran di Kecamatan Paguyangan; dan
 12. Pengembangan stasiun penumpang lainnya.
- b. stasiun barang berupa *dry port* yang berlokasi di Kecamatan Tanjung.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelabuhan Pengunpan Regional;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Brebes di Kecamatan Brebes dan/atau Kecamatan Bulakamba.
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Bulakamba; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Losari.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - c. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - d. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba.
- (6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan; dan
 - b. pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, meliputi:
 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh kecamatan;

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes;
 3. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di seluruh kecamatan;
 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) di seluruh kecamatan; dan
 5. Distribusi Jaringan Pipa Gas Rumah Tangga di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 1. Pembangunan PLTA Kecamatan Banjarharjo;
 2. Pembangunan PLTA Kecamatan Paguyangan;
 3. Pembangunan PLTA Kecamatan Salem; dan
 4. Pembangunan PLTA Kecamatan Bantarkawung.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), meliputi:
 1. Pembangunan PLTPB Kecamatan Sirampog;
 2. Pembangunan PLTPB Kecamatan Paguyangan; dan
 3. Pembangunan PLTPB Kecamatan Bantarkawung.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di masing-masing kecamatan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM), meliputi:
 1. Pembangunan PLTM Kecamatan Brebes;
 2. Pembangunan PLTM Kecamatan Wanasari;
 3. Pembangunan PLTM Kecamatan Bulakamba;
 4. Pembangunan PLTM Kecamatan Tanjung; dan
 5. Pembangunan PLTM Kecamatan Losari.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
 1. Pembangunan PLTMH Kecamatan Paguyangan;
 2. Pembangunan PLTMH Kecamatan Sirampog;
 3. Pembangunan PLTMH Kecamatan Salem; dan
 4. Pembangunan PLTMH Kecamatan Bantarkawung.
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi:
 1. Pembangunan PLTB Kecamatan Songgom;
 2. Pembangunan PLTB Kecamatan Larangan; dan
 3. Pembangunan PLTB Kecamatan Bantarkawung.
 - g. pengembangan pembangkit listrik lainnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kawat saluran udara dan kabel laut, meliputi:

- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), meliputi:
 - 1. Kecamatan Losari;
 - 2. Kecamatan Tanjung;
 - 3. Kecamatan Kersana;
 - 4. Kecamatan Ketanggungan;
 - 5. Kecamatan Bulakamba;
 - 6. Kecamatan Wanasari; dan
 - 7. Kecamatan Jatibarang.
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - 1. Kecamatan Brebes;
 - 2. Kecamatan Wanasari;
 - 3. Kecamatan Bulakamba;
 - 4. Kecamatan Tanjung;
 - 5. Kecamatan Losari;
 - 6. Kecamatan Tonjong;
 - 7. Kecamatan Bumiayu; dan
 - 8. Kecamatan Paguyangan.
 - c. pengembangan infrastruktur jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan/atau Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan/atau saluran kabel tegangan rendah berada di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Paguyangan;
 - b. Kecamatan Wanasari; dan
 - c. Kecamatan Tanjung.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik direncanakan sampai dengan tahun 2039 sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 17

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem wilayah sungai, meliputi:
 1. Sistem Wilayah Sungai Pemali - Comal, meliputi:
 - a) Sungai Kaligangsa;
 - b) Sungai Pemali;
 - c) Sungai Balaikambang;
 - d) Sungai Luwungmalang;
 - e) Sungai Bangsri; dan
 - f) Sungai Pakijangan.
 2. Sistem Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung, meliputi:
 - a) Sungai Kluwut;
 - b) Sungai Babakan;
 - c) Sungai Kabuyutan;
 - d) Sungai Sinung;
 - e) Sungai Tanjung Kulon; dan
 - f) Sungai Bancang.
 - b. Waduk, embung, mata air, dan sumber air lain, meliputi:
 1. Waduk, meliputi:
 - a) Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo;
 - b) Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan;
 - c) Rencana pembangunan waduk di Kecamatan Salem; dan
 - d) Rencana pembangunan waduk di Kecamatan Bantarkawung.
 2. Embung yang termuat dalam Lampiran III.1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 3. Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan;
 4. Mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes yang termuat dalam Lampiran III.2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 5. Pengembangan waduk, embung, dan sumber air lain yang terdapat di permukaan lainnya di wilayah Kabupaten.
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT), meliputi:
 - a. CAT Bumiayu; dan
 - b. CAT Tegal - Brebes.

Pasal 18

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat;
 - b. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan
 - c. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (3) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. daerah irigasi permukaan lintas provinsi pada DI Cisanggarung;
 - b. daerah irigasi permukaan lintas kabupaten/kota, meliputi:
 1. DI Kumisik; dan
 2. DI Pemali Bawah (Bendung Notog).
 - c. daerah irigasi utuh kabupaten/kota berupa DI Waduk Malahayu, meliputi:
 1. DI Jengkelok;
 2. DI Kabuyutan; dan
 3. DI Babakan.
- (4) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. daerah irigasi permukaan lintas kabupaten/kota, meliputi:
 1. DI Gangsa Lumingser;
 2. DI Beji;
 3. DI Gondang;
 4. DI Lenggor;
 5. DI Parakan Kidang; dan
 6. DI Karanganyar.
 - b. daerah irigasi utuh kabupaten/kota berupa DI Kemaron.
- (5) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ketetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi :
 - a. Kecamatan Brebes meliputi Sungai Gangsa dan Sungai Pemali;
 - b. Kecamatan Wanasari meliputi Sungai Balaikambang dan Sungai Luwungmalang;
 - c. Kecamatan Bulakamba meliputi Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, dan Sungai Kluwut;
 - d. Kecamatan Tanjung meliputi Sungai Babakan, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, dan Sungai Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Losari meliputi Sungai Bancang dan Sungai Cisanggarung.

- (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa waduk, sungai, mata air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air.
- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kelompok pengguna sosial;
 - b. kelompok pengguna rumah tangga;
 - c. kelompok pengguna instansi pemerintah;
 - d. kelompok pengguna niaga; dan
 - e. kelompok pengguna industri.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan, meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan/atau
 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:
 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
 - d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
 1. sambungan langsung;
 2. hidran umum; dan/atau
 3. sarana pengambilan air lainnya.
- (3) Rencana bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa tangan.
- b. jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 1. sumur dangkal yang berada pada bangunan;
 2. sumur pompa yang berada pada bangunan;
 3. bak penampungan air hujan untuk menampung air hujan; dan
 4. bangunan penangkap mata air.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (2) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan, meliputi:
 - a. pengembangan IPAL pada masing-masing kegiatan industri;
 - b. pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan
 - c. pengembangan IPAL pada fasilitas kesehatan.
- (3) Sistem pengembangan air limbah rumah tangga (*sewage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *on site* atau individu; dan
 - c. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT), meliputi:
 1. Kecamatan Brebes;
 2. Kecamatan Tonjong; dan
 3. Kecamatan Ketanggungan.

Pasal 22

- Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berupa
- a. pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu; dan
 - b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 pada industri dan fasilitas kesehatan;

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- (2) Pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yakni *reduce, reuse, dan recycle*.

- (3) Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS/ TPST yang tersebar pada setiap kecamatan, meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPST di Kecamatan Brebes; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan peningkatan TPST di setiap wilayah kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA, meliputi:
 1. Kecamatan Brebes; dan
 2. Kecamatan Bumiayu.
 - b. pembangunan, pengembangan dan peningkatan TPA di Kecamatan Ketanggungan.
- (5) Rencana lokasi TPS dan TPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 24

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama;
- b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier; dan
- c. pengembangan embung di masing-masing wilayah kecamatan.

Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dan tanah longsor, meliputi:
 1. Kecamatan Banjarharjo, meliputi:
 - a) Desa Bandungsari;
 - b) Desa Penanggapan; dan
 - c) Desa Sindangheula.
 2. Kecamatan Bantarkawung, meliputi:
 - a) Desa Bangbayang;
 - b) Desa Bantarkawung;
 - c) Desa Jipang;
 - d) Desa Legok;
 - e) Desa Pangebatan; dan
 - f) Desa Terlaya.
 3. Kecamatan Salem, meliputi:
 - a) Desa Banjaran;
 - b) Desa Bentar;
 - c) Desa Gununglarang;
 - d) Desa Pabuaran;
 - e) Desa Pasirpanjang;
 - f) Desa Salem; dan

- g) Desa Wanoja.
- 4. Kecamatan Tonjong, meliputi:
 - a) Desa Kutamendala;
 - b) Desa Kutayu;
 - c) Desa Rajawetan; dan
 - d) Desa Tonjong.
- 5. Kecamatan Larangan, meliputi:
 - a) Desa Karangbale;
 - b) Desa Kedungbokor;
 - c) Desa Larangan; dan
 - d) Desa Pamulihan.
- 6. Kecamatan Ketanggungan, meliputi:
 - a) Desa Baros;
 - b) Desa Buara;
 - c) Desa Cikeusal Kidul;
 - d) Desa Cikeusal Lor;
 - e) Desa Cisureuh; dan
 - f) Desa Sindangjaya.
- 7. Kecamatan Bumiayu, meliputi:
 - a) Desa Adisana;
 - b) Desa Kalierang;
 - c) Desa Langkap;
 - d) Desa Negaradaha; dan
 - e) Desa Pruwatan.
- 8. Kecamatan Sirampog, meliputi:
 - a) Desa Dawuhan;
 - b) Desa Buniwah;
 - c) Desa Igirklanceng;
 - d) Desa Kaligiri;
 - e) Desa Baturisari;
 - f) Desa Kaliloka;
 - g) Desa Plompong;
 - h) Desa Sridadi;
 - i) Desa Wanareja;
 - j) Desa Mendala; dan
 - k) Desa Mlayang.
- 9. Kecamatan Paguyangan, meliputi:
 - a) Desa Cipetung;
 - b) Desa Kedungoleng;
 - c) Desa Kretek;
 - d) Desa Paguyangan;
 - e) Desa Pakujati;
 - f) Desa Ragatunjung;
 - g) Desa Taraban;
 - h) Desa Winduaji; dan
 - i) Desa Wanatirta.
- b. jalur evakuasi bencana letusan gunung api, meliputi:
 - 1. Kecamatan Sirampog, meliputi:
 - a) Desa Benda;
 - b) Desa Buniwah;
 - c) Desa Dawuhan;
 - d) Desa Igirklanceng;
 - e) Desa Kaligiri;
 - f) Desa Kaliloka;
 - g) Desa Manggis;
 - h) Desa Mendala;
 - i) Desa Mlayang;

- j) Desa Sridadi; dan
- k) Desa Wanareja.
- 2. Kecamatan Paguyangan, meliputi:
 - a) Desa Kretek;
 - b) Desa Paguyangan;
 - c) Desa Pandansari;
 - d) Desa Ragatunjung;
 - e) Desa Taraban; dan
 - f) Desa Wanatirta.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mempertimbangkan kawasan permukiman, potensi penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang evakuasi, dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk rute jalur evakuasi; dan
 - b. dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. rencana kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. rencana kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 27

Rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.169 (enam ribu seratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Ketanggungan;
 - d. Kecamatan Salem;
 - e. Kecamatan Sirampog; dan
 - f. Kecamatan Paguyangan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.046 (Sepuluh ribu empat puluh enam) hektar menempati kawasan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes, meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Paguyangan;
 - f. Kecamatan Salem; dan
 - g. Kecamatan Tonjong.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar diatur dengan ketentuan:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, meliputi:
 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian waduk yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk dengan luas kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar, meliputi:
- a. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan
 - b. Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 30

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa cagar alam Telogo Renjeng dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal - Brebes, meliputi:

1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Tanjung;
 3. Kecamatan Bulakamba;
 4. Kecamatan Wanasari;
 5. Kecamatan Brebes;
 6. Kecamatan Banjarharjo;
 7. Kecamatan Kersana;
 8. Kecamatan Ketanggungan;
 9. Kecamatan Larangan;
 10. Kecamatan Songgom;
 11. Kecamatan Jatibarang;
 12. Kecamatan Bantarkawung; dan
 13. Kecamatan Tonjong.
- b. Cekungan Air Tanah (CAT) Bumiayu, meliputi:
1. Kecamatan Tonjong;
 2. Kecamatan Bantarkawung;
 3. Kecamatan Bumiayu;
 4. Kecamatan Paguyangan; dan
 5. Kecamatan Sirampog.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit 100 (seratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah berupa bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkawung;
 - b. Kecamatan Salem;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Sirampog;
 - e. Kecamatan Paguyangan;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kecamatan Larangan; dan
 - i. Kecamatan Banjarharjo.
- (3) Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet, meliputi:
- a. Kecamatan Sirampog;
 - b. Kecamatan Paguyangan; dan
 - c. Kecamatan Bumiayu.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
 - a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes;
 - b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung;
 - c. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan;
 - d. Klentheng di Kecamatan Brebes;
 - e. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Kecamatan Jatibarang;
 - f. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - g. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kampung budaya Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Fosil di Desa Kalijurang dan Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong;
 - j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong; dan
 - k. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran 75 (tujuh puluh lima) cm x 60 (enam puluh) cm x 10 (sepuluh) cm di Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan juga untuk fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 34

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Bulakamba;
 - b. Kecamatan Wanasari; dan
 - c. Kecamatan Brebes

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 35

Rencana kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukkan industri;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. kawasan pariwisata; dan
- h. kawasan permukiman.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23.171 (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Larangan
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Banjarharjo.
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Songgom; dan
 - j. Kecamatan Losari.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 20.613 (dua puluh ribu enam ratus tiga belas) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Tonjong;
 - f. Kecamatan Sirampog;
 - g. Kecamatan Ketanggungan; dan
 - h. Kecamatan Banjarharjo.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan lahan basah beririgasi dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 67.850 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh)
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah Kabupaten Brebes dan menempati kawasan pertanian lainnya.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 67.856 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar dan menempati kawasan tanaman pangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes meliputi:
 - a. Kecamatan Salem dengan luas kurang lebih 3.789 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Bantarkawung dengan luas kurang lebih 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Bumiayu dengan luas kurang lebih 2.981 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Paguyangan dengan luas kurang lebih 2.780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Sirampog dengan luas kurang lebih 2.903 (dua ribu sembilan ratus tiga) hektar;
 - f. Kecamatan Tonjong dengan luas kurang lebih 2.093 (dua ribu sembilan puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Larangan dengan luas kurang lebih 7.354 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 7.818 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas) hektar;
 - i. Kecamatan Kersana dengan luas kurang lebih 1.146 (seribu seratus empat puluh enam) hektar
 - j. Kecamatan Banjarharjo dengan luas kurang lebih 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar;
 - k. Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 4.304 (empat ribu tiga ratus empat) hektar
 - l. Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 2.138 (dua ribu seratus tiga puluh delapan) hektar;
 - m. Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 6.933 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar;
 - n. Kecamatan Wanasari dengan luas kurang lebih 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) hektar;
 - o. Kecamatan Songgom dengan luas kurang lebih 3.484 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) hektar;

- p. Kecamatan Jatibarang dengan luas kurang lebih 2.242 (dua ribu dua ratus empat puluh dua) Hektar; dan
 - q. Kecamatan Brebes dengan luas kurang lebih 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) hektar.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) hektar, meliputi:
- a. Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan; dan
 - b. kawasan perkebunan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 161 (seratus enam puluh satu) Hektar, tersebar di wilayah Kabupaten Brebes dan menempati kawasan pertanian lainnya meliputi:
- a. kawasan peternakan untuk ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas; dan
 - b. kawasan padang penggembalaan.

Paragraf 3 Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - e. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang laut utara Kabupaten Brebes, meliputi:
- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 1 (satu) hingga 4 (empat) mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 4 (empat) hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar atau industri dengan daerah tangkapan di luar penangkapan ikan skala kecil dan menengah.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak dengan luas kurang lebih 7.534 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar, meliputi:
 - 1. Kecamatan Losari;
 - 2. Kecamatan Tanjung;
 - 3. Kecamatan Bulakamba;
 - 4. Kecamatan Wanasari; dan
 - 5. Kecamatan Brebes.
 - b. kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar, meliputi:
 - 1. Kecamatan Salem;
 - 2. Kecamatan Bantarkawung;
 - 3. Kecamatan Banjarharjo;
 - 4. Kecamatan Bumiayu;

5. Kecamatan Ketanggungan;
 6. Kecamatan Paguyangan;
 7. Kecamatan Sirampog; dan
 8. Kecamatan Tonjong.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sentra-sentra perikanan, meliputi:
- a. Kecamatan Losari;
 - b. Kecamatan Tanjung;
 - c. Kecamatan Bulakamba;
 - d. Kecamatan Wanasari; dan
 - e. Kecamatan Brebes.
- (5) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. TPI Kaligangsa di Kecamatan Brebes;
 - b. TPI Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPI Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - d. TPI Pulolampes di Kecamatan Bulakamba;
 - e. TPI Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. TPI Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. TPI Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. TPI Crucuk di Kecamatan Losari; dan
 - i. TPI Sawojajar di Kecamatan Wanasari.
- (6) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Crucuk di Kecamatan Losari;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa di Kecamatan Brebes;
 - c. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - e. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba; dan
 - i. Pelabuhan Perikanan Sawojajar di Kecamatan Wanasari.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, merupakan kawasan pertambangan dan energi yang merupakan kewenangan kabupaten, meliputi:
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara;
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan mineral batuan.
- (3) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan, meliputi:
- a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;

- d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Larangan;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Kecamatan Losari; dan
 - k. Kecamatan Songgom.
- (4) Sebaran kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi:
- a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 5.688 (lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - b. Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) hektar;
 - c. Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 1.063 (seribu enam puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Wanasari dengan luas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektar;
 - e. Kecamatan Kersana dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar; dan
 - f. Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 352 (tiga ratus lima puluh dua) hektar.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI).

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0713/Brebes di Kecamatan Brebes;
 - b. Unit Inteldim di Kecamatan Brebes;
 - c. Komando Rayon Moliter (Koramil), yang terdiri dari :
 - 1. Koramil-01 di Kecamatan Brebes
 - 2. Koramil-02 di Kecamatan Jatibarang

3. Koramil-03 di Kecamatan Wanasari
 4. Koramil-04 di Kecamatan Tanjung
 5. Koramil-05 di Kecamatan Losari
 6. Koramil-06 di Kecamatan Kersana
 7. Koramil-07 di Kecamatan Bulakamba
 8. Koramil-08 di Kecamatan Bumiayu
 9. Koramil-09 di Kecamatan Tonjong
 10. Koramil-10 di Kecamatan Sirampog
 11. Koramil-11 di Kecamatan Paguyangan
 12. Koramil-12 di Kecamatan Bantarkawung
 13. Koramil-13 di Kecamatan Salem
 14. Koramil-14 di Kecamatan Banjarharjo
 15. Koramil-15 di Kecamatan Ketanggungan
 16. Koramil-16 di Kecamatan Larangan
 17. Koramil-17 di Kecamatan Songgom
- d. Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Kluwut di Kecamatan Bulakamba; dan
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara, dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Telaga Renjeng, Waduk Penjalin, Tuk Sirah, dan Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan;
 - b. Waduk Malahayu dan Dadaplangan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo;
 - c. Ranto Canyon, Wana Wisata Kalibaya, Wana Wisata Panenjoan, Bukit Bintang Capar, dan Alam Segar di Kecamatan Salem;
 - d. Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri, Sumur Penganten, Bukit Batarsari Permai, dan Bendung Glempang di Kecamatan Sirampog;
 - e. Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Wisata Kaliwlingi, dan Pulau Hantu di Kecamatan Brebes;
 - f. Pulau Cemara dan Embung Siasem di Kecamatan Wanasari;
 - g. Ekowisata Mangrove Desa Grinting di Kecamatan Bulakamba; dan
 - h. potensi pariwisata alam lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Masjid Agung Brebes dan Makam Mbah Juned di Randusanga Wetan di Kecamatan Brebes;

- b. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
 - c. Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
 - d. Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Candi Jimat, dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong;
 - e. Gedong Jimat, Makam Syech Badhawi dan wisata budaya Kampung Adat Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - f. Candi Pangkuan Desa Cilibur di Kecamatan Paguyangan;
 - g. Dayeuhluhur Desa Jipang di Kecamatan Bantarkawung; dan
 - h. potensi pariwisata budaya lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemandian air panas Cipanas Buaran, Goa Korawa, dan Desa Wisata Kebandungan di Kecamatan Bantarkawung;
 - b. Pemandian Air Panas Tirta Husada Kedungoleng dan Wadas Kaca di Desa wisata Pandansari Kecamatan Paguyangan;
 - c. Agrowisata Besaran Hijau di Kawasan Pabrik Gula di Kecamatan Jatibarang;
 - d. Agrowisata Maribaya Desa Kalinusu di Kecamatan Bumiayu;
 - e. Kubang Bali Resort dan Desa Wisata Winduasri di Kecamatan Salem;
 - f. Agrowisata Rajawetan Kecamatan Tonjong;
 - g. Kampung Pelangi Desa Wisata Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan
 - h. potensi pariwisata buatan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan tentang rencana induk pariwisata Daerah.

Paragraf 8 Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dengan luas kurang lebih 29.418 (dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) hektar, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di masing-masing Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten Brebes dengan luas kurang lebih 14.241 (empat belas ribu dua ratus empat puluh satu) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di luar kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 15.177 (lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

BAB VI
RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi yang Ada di Wilayah Kabupaten

Pasal 45

- Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Industri Terpadu berupa Kawasan Industri Brebes;
 - b. Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);
 - c. Kawasan Perkotaan Bregasmalang;
 - d. Kawasan Gunung Slamet.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis perkotaan Ketanggungan - Kersana;
 - b. kawasan strategis perkotaan Bumiayu;
 - c. kawasan strategis Agropolitan Larangan;
 - d. kawasan strategis Agropolitan Paguyangan; dan
 - e. kawasan strategis perbatasan Cibening.
- (3) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kecamatan Brebes
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan strategis Panembahan Losari;
 - b. kawasan strategis budaya adat Jalawastu; dan

- c. kawasan strategis Pekauman Brebes.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.
- (3) Penataan ruang Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan penataan ruang kabupaten yang berbatasan.
- (4) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Prioritas pemanfaatan ruang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak berganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (6) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan;
 - b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah di mana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
 - f. dukungan pembangunan prasarana dan sarana dasar wilayah;
 - g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (7) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 1. tahap I (tahun 2019 – 2023) yang terbagi menjadi program tahunan;
 2. tahap II (tahun 2024 – 2029);
 3. tahap III (tahun 2030 – 2034); dan
 4. tahap IV (tahun 2035 – 2039).

- (8) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan meliputi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala perkotaan dan regional;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan meliputi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala perkotaan dan regional;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana skala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan kecamatan
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan pada ruang pengawasan jalan harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan kelengkapan jalan atau *street furniture* di ruang milik jalan selama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;

- d. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - f. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan peruntukan ruang yang menunjang kegiatan kepelabuhan dan bongkar muat atau naik turun penumpang dan barang;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi laut dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan transportasi laut;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan atau barrier di sekitar jaringan transportasi laut dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk menjamin keselamatan transportasi laut dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan transportasi laut, penataan ruang di sekitar dan di kawasan transportasi laut harus memperhatikan rencana pengembangan transportasi laut dan ketentuan keselamatan transportasi laut pada ruang lingkungan kerja PPI dan pelabuhan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jaringan transportasi laut yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi laut.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPBU, SPBUN, SPPBE, dan SPBBG dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan dan lingkungan hidup;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk memanfaatkan tanah atau mendirikan bangunan di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *fiber optic* di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler dalam bentuk menara telekomunikasi bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi bersama pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, ruang terbuka hijau kota, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan budidaya, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata alam dan buatan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan khusus berupa pelabuhan, jalan bebas hambatan atau jalan layang, dan jalur kereta api;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumberdaya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, waduk, dan embung;

- c. diperbolehkan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumberdaya air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk industri;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumberdaya air
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi termasuk jalur inspeksi di sepanjang jalur irigasi;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan sumber air baku;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air baku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana umum.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan fasilitas instalasi pengolah air limbah dan jaringan pendukungnya;
 - b. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolah air limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - c. tidak diperbolehkan membuang air limbah ke air atau badan air apabila tidak memenuhi ketentuan baku mutu air limbah;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan air limbah; dan
 - e. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah air limbah yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah B3.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan drainase;
 - c. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi

- saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
- d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - f. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan kelestarian kawasan;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;

- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- f. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam tidak mengubah bentang alam;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
- h. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
- i. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari kawasan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan bangunan pemecah gelombang, pengendali banjir, kegiatan pengendalian kualitas perairan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi, dan jalur evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam pantai;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat (bentang alam, fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai)
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan maupun yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;

- e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi waduk dan daerah penyangganya;
 - d. diperbolehkan kegiatan perikanan dan pertanian dengan tanaman yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan upaya pelestarian;
 - e. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air oleh pihak yang berwenang;
 - f. tidak diperbolehkan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat menurunkan daya tampung waduk pada kawasan ini termasuk daerah pasang surut dan sempadannya; dan
 - g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk dan daerah penyangganya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan pertahanan, pariwisata alam, penelitian, dan pendidikan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam cagar alam harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

- c. diperbolehkan kegiatan yang mendorong peresapan air ke dalam tanah;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
- e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
- g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
- h. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk hutan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 - c. diperbolehkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) gerakan tanah dan longsor;
 - d. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - e. diperbolehkan dengan syarat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertanian, dan perkebunan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan; dan
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan budidaya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya terbangun;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat strategis; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman eksisting.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarahnya; dan
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, pertahanan dan keamanan, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. diperbolehkan kegiatan lain yang berorientasi pada pelestarian hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
- c. diperbolehkan dengan syarat sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;

- e. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
- g. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
- h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan penganeekaragaman jenis tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan untuk kawasan peruntukan peternakan sepanjang tidak berada di lahan pertanian beririgasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan penganeekaragaman jenis hortikultura;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan untuk kawasan peruntukan peternakan sepanjang tidak berada di lahan pertanian beririgasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan luas areal lahan perkebunan
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;

- e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan; dan
 - h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
 - c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan untuk bioenergi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk industri pengolahan hasil ternak;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan; dan
 - f. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
- c. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
- d. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- e. diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ecowisata, penelitian dan pendidikan;
- f. diperbolehkan dengan syarat bangunan pendukung kegiatan pariwisata;
- g. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
- h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perikanan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. diperbolehkan dengan syarat pembangunan peternakan rakyat non permanen;
- j. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan penambangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat penambangan di dalam kawasan lindung;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- f. tidak diperbolehkan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air atau permukiman.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - d. diperbolehkan pengembangan industri dengan memperhatikan persyaratan sebagai industri hijau;
 - e. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase dan sistem pengolahan air limbah yang memadai;
 - f. diperbolehkan kegiatan yang menghasilkan energi untuk kebutuhan industri;
 - g. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman;
 - i. diperbolehkan dengan syarat perusahaan industri atau pabrik-pabrik industri yang berdiri sendiri dan mandiri dapat berada di dalam kawasan peruntukan industri selama belum ada kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industrinya;
 - j. tidak diperbolehkan pada KPI di wilayah Kabupaten Brebes bagian tengah untuk pengembangan industri yang menghasilkan limbah B3 cair; dan
 - k. tidak diperbolehkan membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;

- b. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
- c. diperbolehkan pengembangan industri ramah lingkungan;
- d. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting; dan
- f. tidak diperbolehkan membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan lindung; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat peningkatan sarana prasarana pendukung dalam pengurangan risiko bencana;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan permukiman; dan
- e. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
- b. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan pariwisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan rakyat;
- e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perdesaan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala mikro pada kawasan permukiman;

- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil dan menengah;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri eksisting berdasarkan besaran kualifikasi usahanya; dan
- j. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, kawasan perbatasan Cibening, dan kegiatan agropolitan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan bangunan perlindungan pantai;

- b. diperbolehkan percepatan rehabilitasi atau reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. tidak diperbolehkan percepatan rehabilitasi atau reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi hutan lindung.
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan bangunan fasilitas umum dan sosial dengan mempertimbangkan keserasian bangunan cagar budaya;
 - b. diperbolehkan kegiatan pariwisata budaya dengan tidak mengubah kearifan lokal dan bangunan cagar budaya;
 - c. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat melakukan renovasi pada bangunan cagar budaya yang rusak atau terancam rusak dengan mempertahankan bentuk asli bangunan; dan
 - f. tidak diperbolehkan mengubah fungsi utama kawasan yang dapat menghilangkan kearifan lokal dan budaya.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- (9) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Izin pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh pejabat atau instansi yang berwenang kepada masyarakat.

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 77

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.

- (4) Pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 78

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 79

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 80

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Pasal 83

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang membidangi penataan ruang; dan
 - e. sistem informasi tata ruang wilayah.
- (2) Sistem informasi tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 84

- (1) Dalam menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 90

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan tindakan penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf c dan huruf d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan

yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 100

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa RDTR Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019 NOMOR 13



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13-416/ 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis, serta penataan ruang wilayah kabupaten.

RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri, agro industri, perdagangan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Brebes memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis

dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang sangat berkaitan erat dengan RTRW Kabupaten karena merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupaten.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” adalah rencana susunan pusat-pusat

permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah yang dilintasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (4)

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan Menteri dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan Bupati.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jalan desa” adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Penyelenggaraan jalan khusus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi bersama” adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver*

Station) berdasarkan *cellular planning (cellplan)* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang diatur dalam peraturan perundangan daerah. Pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:

- a. arahan lokasi menara telekomunikasi;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
- d. jarak antar menara telekomunikasi;
- e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
- f. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun” adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sungai atau jaringan penampung air dari jaringan sekunder.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “drainase sekunder” adalah jaringan drainase yang mengikuti pola

jalan raya (jalan arteri dan kolektor) di kanan atau kirinya yang menampung air hujan dan air limbah (buangan) rumah tangga dialirkan secara gravitasi ke tempat yang lebih rendah menuju saluran pembuangan (sungai).

Yang dimaksud dengan “drainase tersier” adalah jaringan drainase yang terdapat di dalam lokasi jalan lokal dan jalan lingkungan dalam permukiman penduduk.

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “rencana kawasan peruntukan lindung” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan

dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “rencana kawasan peruntukan budidaya” adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri paling sedikit meliputi lahan industri dan fasilitas pendukung industri.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten” adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten” penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

yang dimaksud dengan “bangunan eksisiting dengan fungsi kepentingan umum” adalah bangunan yang berdiri sebelum Perda ini ditetapkan dengan fungsi kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 yaitu : pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 68

yang dimaksud dengan “bangunan eksisiting dengan fungsi kepentingan umum” adalah bangunan yang berdiri sebelum Perda ini ditetapkan dengan fungsi kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 yaitu : pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas

operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “industri eksisting berdasarkan besaran klasifikasinya” adalah kondisi industri yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang telah atau pernah berjalan sebelum Perda ini disahkan;

Yang dimaksud dengan industri kecil dan menengah adalah :

Industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau menggunakan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk

mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13

LAMPIRAN II : RUAS JALAN KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2019-2039

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN		PANJANG RUAS (km)
1	29	1	Losari	- Prapag Lor	7,800
2	29	2	Prapag Kidul	-TPI	4,300
3	29	3	Losari Lor	- Kecipir	2,500
4	29	4	Losari	- Bojongsari	9,410
5	29	5	Bojongsari	- Cikakak	7,350
6	29	6	Cikakak	- Cibendung	2,500
7	29	7	Cikakak	- Banjarharjo	8,560
8	29	8	Cikakak	- Kobokan	8,300
9	29	9	Tengguli	- Luwunggede	5,750
10	29	10	Tanjung	- Kramatsampang	3,100
11	29	11	Tanjung	- Kersana	6,070
12	29	12	Tanjung	- Pengaradan	6,000
13	29	13	Pejagan	- Krakahan	4,750
14	29	14	Jagapura Lor	- Jagapura Kidul	1,000
15	29	15	Kersana	- Randugede	3,800
16	29	16	Kemukten	- Limbangan	2,500
17	29	17	Ketanggungan	- Sutamaja	5,350
18	29	18	Ketanggungan	- Banjarharjo	7,825
19	29	19	Ketanggungan	- B a r o s	6,500
20	29	20	Kubangpari	- Sindangjaya	2,800
21	29	21	Ketanggungan	- Dukuhtengah	1,800
22	29	22	Ketanggungan	- Karangmalang	1,250
23	29	23	Baros	- Karangdawa/ Bandung	1,750
24	29	24	Baros	- Cikeusal Kidul	10,900
25	29	25	Cikeusal	- Pamedaran	3,000
			Pamedaran	- Kertasari	4,000
26	29	26	Pasarbatang	- Dukuhtledung	0.450
27	29	27	Kedunguter	- Pagejungan	1,500
28	29	28	Pagejungan	- Pagejungan	0.700
29	29	29	Wangandalem	- Pemaron	2,020
30	29	30	Ciputih	- Kadumanis	5,500
31	29	31	Cikeusal Kidul	- Cisereuh	6,000
32	29	32	Malahayu	- Waduk Malahayu	1,350
33	29	33	Banjarharjo	- Longkrang	2,500
34	29	34	Grinting	- Pulogading	3,650
35	29	35	Bulakamba	- Pulolampes	4,000
36	29	36	Bulakamba	- Slatri	8,300
37	29	37	Slatri	- Kendaga	5,900
38	29	38	Bulakelor	- Luwunggede	4,400
39	29	39	Klompok	- Sitanggal	9,920
40	29	40	Klompok	- Banjaratma PG	5,600
41	29	41	Sitanggal	- Larangan	7,350
42	29	42	Larangan	- Pamulihan	9,000
43	29	43	Pamulihan	- Jamasih	13,000
44	29	44	Pamulihan	- Wlahar	9,550
45	29	45	Banjaratma	- Tegalgandu	6,000
46	29	46	Banjaratma	- Layapan	4,000
47	29	47	Kedawon	- Poncol	7,400
48	29	48	Klompok	- Sawojajar	6,000
49	29	49	Sawojajar	- Pandansari	5,000
50	29	50	Klompok	- Dumeling	3,000
51	29	54	Klompok	- Dukuh Canting	3,000

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN		PANJANG RUAS (km)
52	29	55	Pebatan	- Rengaspendawa	9,900
53	29	56	Pasarbatang	- Tengki	3,900
54	29	57	Sigambir	- Kalikamal	6,000
55	29	58	Pasarbatang	- Pagejukan	3,000
56	29	59	Kalikamal	- Randusanga Kulon	3,400
57	29	60	Brebes	- Sigempol	3,800
58	29	61	Limbangan Wetan	- Randusanga Kulon	3,500
59	29	62	Randusanga Kulon	- Pantai	2,500
60	29	63	Randusanga Kulon	- Perbatasan Tegal	3,500
61	29	64	Kaligangsa Kulon	- Randusanga Wetan	4,500
62	29	65	Kaligangsa Wetan	- Randusanga Wetan	4,500
63	29	66	Kaligangsa Wetan	- Kalipucang	6,950
64	29	67	Wangandalem	- Lembarawa	3,700
65	29	68	Terlangu	- Pamaron	0.600
66	29	69	Brebes	- Jatibarang	7,300
67	29	70	Klikiran	- Kebonagung	6,500
68	29	71	Kalipucang	- Jatibarang	5,400
69	29	72	Jatibarang	- Tegalwulung	3,400
70	29	73	Pamengger	- Kramat	3,200
71	29	74	Tangglog	- Songgom	9,200
72	29	75	Jatirokeh	- Cenang	4,300
73	29	76	Pasirpanjang	- Wanoja	5,000
74	29	77	Kedungoleng	- Perbatasan Banyumas	2,550
75	29	78	Bentar	- Ciputih	3,000
76	29	79	Bangbayang	- Jemasih	10,700
77	29	80	Sindangwangi	- Pengarasan	4,500
78	29	81	Pengarasan	- Kebandungan	3,500
79	29	82	Klampok	- K u p u	2,000
80	29	83	Salem	- Tembongraja	6,000
81	29	84	Tembongraja	- Capar	6,000
82	29	85	Indrajaya	- Gunungjaya	3,000
83	29	86	Pangebatan	- Waru (Perb. Cilacap)	10,500
84	29	87	Parasi	- Karangpari	6,000
85	29	88	Buaran	- Telaga	4,000
86	29	89	Buaran	- Banjarsari	9,500
87	29	90	Kaliwadas	- Kedungoleng	8,600
88	29	91	Paguyangan	- Kedungoleng	6,300
89	29	92	Winduaji	- Perbatasan Banyumas	4,300
90	29	93	Paguyangan	- Wanatirta	2,500
91	29	94	Kretek	- Kaligua	14,600
92	29	95	Kaligua	- Igirklanceng	6,000
93	29	96	Sijampang	- Cipetung	2,500
94	29	97	Bumiayu	- Kalinusu	6,000
95	29	98	Talok	- Maribaya	9,200
96	29	99	Kaligadung	- Galuhtimur	5,100
97	29	100	Kaligadung	- Benda	3,200
98	29	102	Linggapura	- Mendala	6,500
99	29	103	Linggapura	- Balapusuh	6,400
100	29	104	Kutamendala	- Purwodadi	6,500
101	29	105	Terlangu	- Kalipucang	4,800
102	29	106	Bumiayu	- Lamgkap	6,500
103	29	107	Talok	- Sakalimalas	0.900
104	29	108	Komplek Pasar	- Tanjung	1,000
105	29	109	Wanoja	- Capar	4,000
106	29	110	Stasiun Bulakamba		0.800
107	29	531	Bangsri	- Sibajag	6,500
108	29	532	Kecipir	- Blangko	0.900
109	29	533	Jalan Lingkar Losari		2,500
110	29	534	Langkap	- Cilibur	5,000
111	29	535	Kretek	- Pagatunjung	6,000
112	29	536	Cilibur	- Plompong	2,000
113	29	537	Kaliloka	- Plompong	2,000
114	29	538	Cilibur	- Gunungsumping	3,000
115	29	539	Pagojengan	- Taraban	3,000

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN		PANJANG RUAS (km)
116	29	540	Taraban	- Pakujati	5,000
117	29	541	Kendawa	- Pamengger	2,000
118	29	542	Jatibarang	- Karanglo	2,500
119	29	543	Ketanggungan	- Bulakelor (Jalan Lingkar)	3,000
120	29	544	Padasugih	- Wangandalem-Pulosari	2,500
JUMLAH I					592,305

RUAS JALAN DALAM KOTA

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN		PANJANG RUAS JALAN (km)
DALAM	KOTA	KECAMATAN	BUMIAYU		
1	29	111	Jl. KH. Nawawi		1,200
2	29	112	Jl. H. Abdul Goni		0.400
3	29	113	Jl. KH. Nasucha		0.180
4	29	114	Jl. KH. Mudhakhir		0.160
5	29	115	Jl. Sabrawi		0.100
6	29	116	Jl. KH. Ichsan Turmudi		0.930
7	29	117	Jl. PLN Bumiayu		0.200
8	29	118	Jl. H. Ali Machnuri		1,500
9	29	119	Jl. H. Marzuki		0.600
10	29	120	Jl. Kawedanan		0.050
11	29	121	Jl. KH. Rosul		0.130
12	29	122	Jl. Bunga Saroja		0.750
13	29	123	Jl. H. Yasin		0.600
14	29	124	Jl. Sersan Dakum		0.410
15	29	125	Jl. Tanjung		0.500
16	29	126	Jl. Masjid Darussalam		0.060
17	29	127	Jl. Ali Karta		0.300
18	29	128	Jl. H. Abdul Wahid		1,600
19	29	129	Jl. Rumono		0.290
20	29	130	Jl. Majapahit		0.380
21	29	131	Jl. Pancurawis		2,830
22	29	132	Jl. Pendawa		0.700
23	29	133	Jl. KH. Arobiali		0.420
24	29	134	Jl. KH. Ahmad Dahlan		0.310
25	29	135	Jl. H. Siti Aminah		0.310
26	29	136	Jl. Empu Kanang		0.320
27	29	137	Jl. Burhan		0.280
28	29	138	Jl. H. Siti Aminah		0.700
29	29	139	Jl. H. Hasyim As'ari		0.330
30	29	140	Jl. K. Abar		0.520
31	29	141	Jl. Rukyat		1,060
32	29	142	Jl. Pesantren		0.330
33	29	143	Jl. K. Muchidin		0.330
35	29	144	Jl. Abimanyu		0.800
36	29	145	Jl. Dabud		0.200
37	29	146	Jl. Abdul Halim		0.200
38	29	147	Jl. Mujahidin		0.500
39	29	148	Jl. Suhari		0.150
40	29	149	Jl. KH Munadi		0.600
41	29	150	Jl. Habib Alwi		1,500
42	29	151	Jl. Fatkhur Rozak		0.800
43	29	152	Jl. KH. Syaroni		2,200
44	29	153	Jl. KH. Mustofa		0.300
45	29	154	Jl. Masduki		1,200
46	29	155	Jl. KH. Malawi		0.400
47	29	156	Jl. H. Abu Hasan		0.400
48	29	157	Jl. Kertasinduyasa		0.400
49	29	158	Jl. Veteran		0.200
50	29	159	Jl. Kepatihan		0.400
51	29	160	Jl. Letkol Solichin		0.900
52	29	161	Jl. Yasin		0.900

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS JALAN (km)
53	29	162	Jl. Abdur Rachman	0.060
54	29	163	Jl. Abu Nasir Hasan	0.500
55	29	164	Jl. R. Patah	0.250
56	29	165	Jl. Bhayankara	0.300
DALAM KOTA KECAMATAN BREBES				
1	29	401	Jl. Dr. Setiabudi	0.670
2	29	402	Jl. MT Haryono	0.670
3	29	403	Jl. Husni Thamprin	0.335
4	29	404	Jl. Dr. Wahidin	0.340
5	29	405	Jl. RA. Kartini	0.370
6	29	406	Jl. Brigjen Katamso	0.300
7	29	407	Jl. Kapten P Tendean	0.600
8	29	408	Jl. KS Tubun	0.400
9	29	409	Jl. Dr. Sam Matulangi	0.800
10	29	410	Jl. Letjen Suprpto	0.880
11	29	411	Jl. Kopol B. Suprpto	0.200
12	29	412	Jl. KH Wahid Hasyim	0.370
13	29	413	Jl. HOS Cokroaminoto	0.370
14	29	414	Jl. Letjend Sutoyo	0.300
15	29	415	Jl. Letjend S. Parman	0.700
16	29	416	Jl. Prof. M. Yamin	0.870
17	29	417	Jl. KH. Achmad Dahlan	1,525
18	29	418	Jl. Agus Salim	0.390
19	29	419	Jl. Dr. Sutomo	0.470
20	29	420	Jl. V e t e r a n	0.400
21	29	421	Jl. Taman Siswa	2,500
22	29	422	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo	0.540
23	29	424	Jl. Hasanudin	1,450
24	29	425	Jl. Wangandalem	0.600
25	29	426	Jl. Lingkungan Kota Baru I s/d XIV	1,200
26	29	427	Jl. Kolonel Sugiono	0.270
27	29	428	Jl. DI. Panjaitan	0.310
28	29	429	Jl. Imam Syhadat	0.280
29	29	430	Jl. Agus Miftah	0.700
30	29	431	Jl. Kyai Kholid	0.500
31	29	432	Jl. AIP KS. Tubun	0.450
32	29	433	Jl. Kyai Maja	0.170
33	29	434	Jl. Dewi Sartika	1,700
35	29	435	Jl. Teuku Cik Ditro	2,300
36	29	436	Jl. Teuku Umar	0.380
37	29	437	Jl. Imam Bonjol	0.400
38	29	438	Jl. Mayjend. Sungkono	0.700
39	29	439	Jl. B i n a j i	-
40	29	440	Jl. Sultan Agung	2,620
41	29	441	Jl. Pahlawan	0.330
42	29	442	Jl. Dr. Sardjito	0.770
43	29	443	Jl. WR. Supratman	3,050
44	29	444	Jl. C. Simanjuntak	0.650
45	29	445	Jl. Chairil Anwar	0.270
46	29	446	Jl. Abdul Muis	0.300
47	29	447	Jl. Moch. Muntoha	1,650
48	29	448	Jl. Ade Irma Suyani	0.180
49	29	449	Jl. Cut Nya Dien	0.050
50	29	450	Jl. S l a m e t	0.300
51	29	451	Jl. T r i t u r a	0.290
52	29	452	Jl. AR Hakim	0.180
53	29	453	Jl. Ustad Abbas	0.340
54	29	454	Jl. Singosari Panotoyudo	0.250
55	29	455	Jl.H. Syatori	0.320
56	29	456	Jl. Kyai Buchori	0.500
57	29	457	Jl. Zaenal Arifin	0.280
58	29	458	Jl. H. Mas Mansur	0.250
59	29	459	Jl. Ronggo Warsito	2,100
60	29	460	Jl. Puspongoro	0.540

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS JALAN (km)
61	29	461	Jl. Yos Sudarso	2,050
62	29	462	Jl. Tentara Pelajar	0.850
63	29	463	Jl. Mangunsarkoro	2,050
64	29	464	Jl. Sunan Gunung Jati	0.950
65	29	465	Jl. Sunan Gunung Jati I,II,III,IV	2,050
66	29	466	Jl. Raden Patah	1,180
67	29	467	Jl. Sunan Ampel	0.180
68	29	468	Jl. Sunan Giri	0.450
69	29	469	Jl. Sunan Bonang	0.450
70	29	470	Jl. Prof Kahar Muzakir	0.550
71	29	471	Jl. Sunan Kudus	0.500
72	29	472	Jl. Sunan Muria	0.500
73	29	473	Jl. KH. Samanhudi	0.550
74	29	474	Jl. Sunan Derajat	0.800
75	29	475	Jl. Sunan Kalijaga	0.500
76	29	476	Jl. Perintis Kemerdekaan	0.500
77	29	477	Jl. Condro Negoro	0.700
78	29	478	Jl. Malahayu Raya	0.330
79	29	479	Jl. Telaga Renjeng	0.340
80	29	480	Jl. Anggrek	0.240
81	29	481	Jl. Mawar	0.190
82	29	482	Jl. Melati	0.240
83	29	483	Jl. Cempaka	0.230
84	29	484	Jl. Kenanga	0.140
85	29	485	Jl. Nusa Indah	0.150
86	29	486	Jl. Flamboyan	0.210
87	29	487	Jl. J a w a	0.420
88	29	488	Jl. Sumatra	0.250
89	29	489	Jl. Kalimantan	0.800
90	29	490	Jl. Sulawesi	0.280
91	29	491	Jl. I r i a n	0.030
92	29	492	Jl. Maluku	0.310
93	29	493	Jl. B a t a m	0.290
94	29	494	Jl. Samosir	0.100
95	29	495	Jl. N i a s	0.050
96	29	496	Jl. Bengkulu	0.040
97	29	497	Jl. Bintan	0.070
98	29	498	Jl. Bangka	0.170
99	29	499	Jl. Belitung	0.210
100	29	500	Jl. Madura	0.080
101	29	501	Jl. B a l i	0.080
102	29	502	Jl. Lombok	0.060
103	29	503	Jl. Sumbawa	0.050
104	29	504	Jl. Sumba	0.050
105	29	505	Jl. Flores	0.030
106	29	506	Jl. Timor	0.030
107	29	507	Jl. Ambon	0.100
108	29	508	Jl. S e r a m	0.020
109	29	509	Jl. Ternate	0.540
110	29	510	Jl. Tidore	0.100
111	29	511	Jl. Halmahera	0.430
112	29	512	Jl. B u t o n	0.120
113	29	513	Jl. B i a k	0.120
114	29	514	Jl. Karimata	0.070
115	29	515	Jl. Karimunjawa	0.060
116	29	516	Jl. Limbangan wetan	3,500
117	29	517	Jl. Kaligangsa wetan	2,200
118	29	518	Jl. KH. Hasyim As' ari	1,200
119	29	519	Jl. G O R	0.750
120	29	520	Jl. Merpati	0.275
121	29	521	Jl. Pulosari	3,200
122	29	522	Jl. Candra	0.280
123	29	523	Jl. Baitul Muslimin	0.450
124	29	524	Jl. Ralijan	0.600

NO.	NO. KAB.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS JALAN (km)
125	29	525	Jl. Siasem Timur	1,300
126	29	526	Jl. Siasem Barat	1,450
127	29	527	Jl. Tanjungsari	3,000
128	29	528	Jl. Sigambir I	0.500
129	29	529	Jl. Sigambir II	0.200
130	29	530	Jl. Sigambir III	0.200
131	29	531	Jl. Dukuh Tledung	0.200
JUMLAH TOTAL				710,190

LAMPIRAN II : EMBUNG DI KABUPATEN BREBES
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13
 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2039

DAFTAR EMBUNG DI KABUPATEN BREBES

No.	Daerah Irigasi	Lokasi Waduk Lapangan	Luas Waduk Lapangan (m²)	Suplesi Saluran	Luas Areal yag disuplai (Ha)	Desa	Kecamatan
1	Pemali Hilir	Gg. 1 A	5.475	Gegerkunci	1.027	Songgom	Songgom
2	Pemali Hilir	C 1 Ka. E	5.658	Cenang	84	Cenang	Songgom
3	Pemali Hilir	C 1 Kit. C	2.499	Cenang	100	Cenang	Songgom
4	Pemali Hilir	C 1 Ki. D	2.600	Cenang	64	Cenang	Songgom
5	Pemali Hilir	Gg.2 Ki.A	3.710	Gegerkunci	101	Gegerkunci	Songgom
6	Pemali Hilir	Gg.2 Ka.B	3.986	Gegerkunci	98	Jatimakmur	Songgom
7	Pemali Hilir	Gg.2	5.244	Gegerkunci	364	Gegerkunci	Songgom
8	Pemali Hilir	Gg.3 Ki.B	3.480	Gegerkunci	107	Cenang	Songgom
9	Pemali Hilir	Pa 3 Ki.	6.142	Tersier Pa	70	Jatimakmur	Songgom
10	Pemali Hilir	Pa 4 Ka.	1.936	Tersier Pa	74	Jatirokeh	Songgom
11	Pemali Hilir	Pa 4 Ki.	2.025	Tersier Pa	68	Jatirokeh	Songgom
12	Pemali Hilir	Pa 5 Ki.	1.156	Tersier Pa	40	Karangsembung	Songgom
13	Pemali Hilir	Pa 5 Hil.	2.604	Tersier Pa	96	Karangsembung	Songgom
14	Pemali Hilir	Pa 5 Ka.	1.444	Tersier Pa	61	Karangsembung	Songgom

No.	Daerah Irigasi	Lokasi Waduk Lapangan	Luas Waduk Lapangan (m ²)	Suplesi Saluran	Luas Areal yag disuplai (Ha)	Desa	Kecamatan
15	Pemali Hilir	Pa 6 Ka.	2.401	Tersier Pa	91	Karangsembung	Songgom
16	Pemali Hilir	Pa 6 Ki.	1.849	Tersier Pa	80	Karangsembung	Songgom
17	Pemali Hilir	Py 1	3.844	Tersier Payung	161	Jatirokeh	Songgom
18	Pemali Hilir	Py 1 Ki	3.025	Tersier Payung	105	Jatirokeh	Songgom
19	Pemali Hilir	Wt 1 Ka	3.136	Tersier Wanatawang	120	Wanatawang	Songgom
20	Pemali Hilir	Wt 1 Ki. D	2.401	Tersier Wanatawang	96	Wanatawang	Songgom
21	Pemali Hilir	Wt 1 Ki.	961	Tersier Wanatawang	46	Wanatawang	Songgom
22	Pemali Hilir	Bj 1	3.366	Bojong	110	Karangsembung	Songgom
23	Pemali Hilir	Pa 8 C	2.500	Tersier Pa	186	Dukuhmaja	Songgom
24	Pemali Hilir	Bj 2	5.476	Bojong	444	Klampis	Jatibarang
25	Pemali Hilir	Pa 10 D	3.135	Tersier Pa	90	Janegara	Jatibarang
26	Pemali Hilir	Pa 10 E	4.158	Tersier Pa	137	Kertasinduyasa	Jatibarang
27	Pemali Hilir	Tw1 Ka F	3.360	Tersier Pa	63	Jatibarang Lor	Jatibarang
28	Pemali Hilir	Tw 1 Ki D	4.026	Tersier Pa	72	Kertasinduyasa	Jatibarang
29	Pemali Hilir	Tw2 C	4.427	Pamengger	336	Karanglo	Jatibarang
30	Pemali Hilir	Kd 1 A	3.190	Kendawa	137	Kendawa	Jatibarang
31	Pemali Hilir	Kd 2 Kat F	3.960	Kendawa	152	Buaran	Jatibarang
32	Pemali Hilir	Kd 2 Ka B	4.140	Kendawa	3.087	Buaran	Jatibarang
33	Pemali Hilir	Kd 2 Ki	2.346	Kendawa	87	Buaran	Jatibarang
34	Pemali Hilir	Pm 1 A	4.680	Tersier Pm	202	Tembelang	Jatibarang
35	Pemali Hilir	Tw 3 F	3.360	Tegalwulung	117	Tegalwulung	Jatibarang
36	Pemali Hilir	Tw 4 D	1.933	Tegalwulung	286	Pedeslohor	Jatibarang
37	Pemali Hilir	Tw 5 Ki	2.862	Tegalwulung	221	Kalialang	Jatibarang
38	Pemali Hilir	Tw 5 Ka. B	3.132	Tegalwulung	288	Lembarawa	Jatibarang

No.	Daerah Irigasi	Lokasi Waduk Lapangan	Luas Waduk Lapangan (m ²)	Suplesi Saluran	Luas Areal yag disuplai (Ha)	Desa	Kecamatan
39	Pemali Hilir	Tb 1 E	1.643	Tembelang	219	Pamengger	Jatibarang
40	Pemali Hilir	Tb 2 A	3.716	Tembelang	167	Pamengger	Jatibarang
41	Pemali Hilir	Kd 3 Ka. E	5.460	Tersier Kendawa	168	Pemaron	Brebes
42	Pemali Hilir	Kd 3 Kat. A	3.944	Tersier Kendawa	121	Pemaron	Brebes
43	Pemali Hilir	Ks 1 F	4.032	Tersier Ks	127	Krasak	Brebes
44	Pemali Hilir	Ks 2 C	6.560	Tersier Ks	122	Banjarnayar	Brebes
45	Pemali Hilir	Pi 3 Ka	18.680	Sal. Sawojajar	13.739	Larangan	Larangan
46	Pemali Hilir	Pi 3 Kat	5.152	Sal. Sawojajar	144	Larangan	Larangan
47	Pemali Hilir	Pi 3 Ka	3.021	Tersier	74	Larangan	Larangan
48	Pemali Hilir	Pi 3 Kit	4.946	Tersier	83	Larangan	Larangan
49	Pemali Hilir	Pi 3 Ka	7.500	Sal. Sawojajar	3.791	Larangan	Larangan
50	Pemali Hilir	Pi 5	7.056	Sal. Pemali Ki	5.164	Karangbale	Larangan
51	Pemali Hilir	Kdb 1 Ki	4356	Tersier	126	Larangan	Larangan
52	Pemali Hilir	Kdb 2	6084	Tersier	226	Kedungbokor	Larangan
53	Pemali Hilir	Sw 1 Ki	3596	Sal. Blewah	1.225	Larangan	Larangan
54	Pemali Hilir	Sw 2	5925	Sal. Sawojajar	12.353	Larangan	Larangan
55	Pemali Hilir	Bw 2 A	12100	Tersier Bw	82	Larangan	Larangan
56	Pemali Hilir	Sw 5	7470	Tersier Sawojajar	5.746	Rengaspendawa	Larangan
57	Pemali Hilir	Sw 8 A	10455	Tersier Sawojajar	5.327	Sitanggal	Larangan
58	Pemali Hilir	Bw 3 A	8230	Sal. Tersier Bw	189	Larangan	Larangan
59	Pemali Hilir	Sk 3	8010	Sal. Tersier Sk.	201	Slati	Larangan
60	Pemali Hilir	Pl 2 Ki	7211	Tersier Pl	78	Sitanggal	Larangan
61	Pemali Hilir	Pl 4	7776	Sal. Sek. Pl	908	Slati	Larangan
62	Pemali Hilir	Pt 1 Ka	10200	Tersier Pt	124	Sitanggal	Larangan

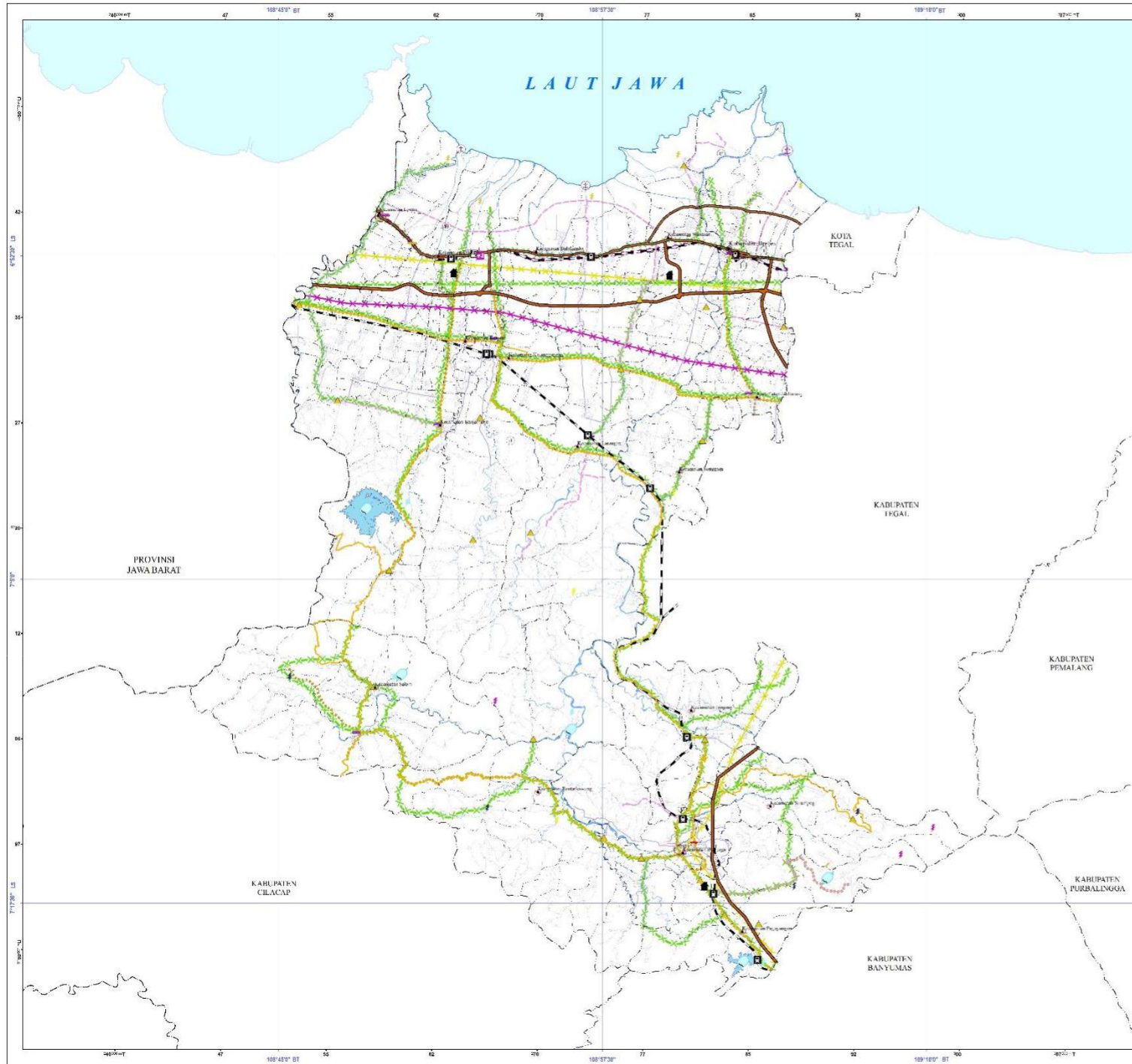
No.	Daerah Irigasi	Lokasi Waduk Lapangan	Luas Waduk Lapangan (m ²)	Suplesi Saluran	Luas Areal yag disuplai (Ha)	Desa	Kecamatan
63	Pemali Hilir	Wn 1 Ki	7546	Tersier	139	Rengaspendawa	Larangan
64	Pemali Hilir	Wn 2 Ki. B	10000	Sal. Sek. Wanasari	1.494	Rengaspendawa	Larangan
65	Pemali Hilir	Lw 2 A	6888	Tersier Lw	120	Luwunggede	Larangan
66	Pemali Hilir	Lw 2	4290	Sal. Sek. Lw	291	Luwunggede	Larangan
67	Pemali Hilir	Bl 1 Ka	11235	Sal. Sek. Bl	295	Luwunggede	Larangan
68	Pemali Hilir	Rm 1 A	7395	Sal. Sek. Rm	275	Kubangwungu	Ketanggungan
69	Pemali Hilir	Cm 3 Kat	5476	Sal. Sek. Cm	3.291	Kubangwungu	Ketanggungan
70	Pemali Hilir	Cm 5	3828	Sal. Sek. Cm	3.048	Dukuhturi	Ketanggungan
71	Pemali Hilir	Rw 2 B	9800	Sal. Sek. Rw	1.015	Balakelor	Ketanggungan
72	Pemali Hilir	Cm 10	3312	Sal. Sek. Cm	198	Kemurangwetan	Tanjung
73	Pemali Hilir	Bp 2 A	11400	Sal. Sek. Bp	899	Dukuhlo	Bulakamba
74	Pemali Hilir	Bp 2	3843	Sal. Sek. Bp	454	Dukuhlo	Bulakamba
75	Pemali Hilir	Rw 4	9114	Sal. Sek. Rw	465	Kluwut	Bulakamba
76	Pemali Hilir	Rw 6 Ki	7476	Tersier Rw	134	Kluwut	Bulakamba
77	Pemali Hilir	Pt 3 Ki	6622	Saluran Pt	226	Tegalglagah	Bulakamba
78	Pemali Hilir	Pt 3 Ka	3368	Tersier Pt	91	Tegalglagah	Bulakamba
79	Pemali Hilir	Pl 9	3520	Saluran Pl	2.216	Cipelem	Bulakamba
80	Pemali Hilir	Pl 10	6560	Saluran Pl	2.022	Rancawuluh	Bulakamba
81	Pemali Hilir	Pl 11	9996	Saluran Pl	1.842	Karangsari	Bulakamba
82	Pemali Hilir	Pk 1 B	7500	Saluran Pk	715	Banjaratma	Bulakamba
83	Pemali Hilir	Bgs 1	7848	Saluran Bgs	251	Siwuluh	Bulakamba
84	Pemali Hilir	Sw 14	17176	Saluran Sw	2.466	Luwunragi	Bulakamba
85	Pemali Hilir	Wn 5 A	15840	Saluran Wn	182	Jagalempeni	Wanasari
86	Pemali Hilir	Tgg 1	9025	Saluran Tgg	361	Tegalgandu	Wanasari


No.	Daerah Irigasi	Lokasi Waduk Lapangan	Luas Waduk Lapangan (m²)	Suplesi Saluran	Luas Areal yag disuplai (Ha)	Desa	Kecamatan
87	Pemali Hilir	Dkw 1	9508	Saluran Dkw	148	Tanjungsari	Wanasari
88	Pemali Hilir	Sw 9 Ki	5408	Saluran Dkw	264	Dukuhwringin	Wanasari
89	Pemali Hilir	Sw 9 Ka	4900	Tersier Sw	146	Dukuhwringin	Wanasari
90	Pemali Malahayu	B. Pbr. 1	9557	Sal. Sek. Kersana	113	Sindangjaya	Kersana
91	Pemali Malahayu	B. Kn. 1	12472	Sal. Sek. Kersana	236	Sindangjaya	Kersana
92	Pemali Malahayu	Bkb 2 tengah	99272	Sal. Sek. Kabuyutan	384	Kradenan	Kersana
93	Pemali Malahayu	B. Pbr. 2 a	39519	Sal. Sek. Pabrik	267	Cikandang	Kersana
94	Pemali Malahayu	B. Pbr. 2 Ki	9576	Sal. Sek. Pabrik	158	Ciampel	Kersana
95	Pemali Malahayu	B. Pbr. 2 Ka	87317	Sal. Sek. Pabrik	267	Kersana	Kersana


LAMPIRAN III.2 : SEBARAN MATA AIR
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
 NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
 TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 BREBES TAHUN 2019-2039

DAFTAR SEBARAN MATA AIR DI KABUPATEN BREBES

No.	Kecamatan	Mata Air
1.	Salem	Mata Air Leuwi Liang
2.	Bantarkawung	Mata Air Ciwenay, Mata Air Cipanas, Mata Air Ciburial, Mata Air Wates, Mata Air Cibeurih, Mata Air Gunung geulis, Mata Air Cipanas;
3.	Paguyangan	Mata Air Tlaga, Mata Air Glagah, Mata Air Crewet, Mata Air Sirengseng, Mata Air Buyah, Mata Air Kedungagung, Mata Air Mungguhan, Mata Air Wuluh, Mata Air Salak, Mata Air Longkrang, Mata Air Gondok, Mata Air Putat, Mata Air Tasiem, Mata Air Dudul, Mata Air Ciptung, Mata Air Longkrang, Mata Air Sidomoro, Mata Air Yampak, Mata Air Sangkarwangi, Mata Air Cipendok, Mata Air Kedung Cina, Mata Air Baas, Mata Air Guci, Mata Air Tanjurnmalang, Mata Air Sat, Mata Air Kemadu, Mata Air Arca, Mata Air Grayang, Mata Air Kudu, Mata Air Benuang, Mata Air Cipanas, Mata Air Manggis, Mata Air Mranggi, Mata Air Sirah Pemali, Mata Air Sirah Duaji, Mata Air Gronggongan;
4.	Bumiayu	Mata Air Muncang, Mata Air Malik, Mata Air Majapahit, Mata Air Watu Ganjel, Mata Air Cilebak, Mata Air Arus I, Mata Air Arus II, Mata Air Biyuk, Mata Air Tinggan, Mata Air Wangi, Mata Air Bulakan, Mata Air Gembrong, Mata Air Bulu, Mata Air Aripsi, Mata Air Sirah, Mata Air Ampel, Mata Air Podol, Mata Air Dlimas, Mata Air Petuanan, Mata Air Kondang, Mata Air Mudal;
5.	Sirampog	Mata Air Tlagasari, Mata Air Salak, Mata Air Crona, Nangka, Mata Air K. Pari, Mata Air K. Giri, Mata Air Sridadi, Tlahap, Mata Air Plembang, Mata Air Bali, Mata Air Biuh, Kaligiri, Mata Air Suci, Mata Air Jayu, Arif/Sanjayuda, Mata Air Jumbleng, Mata Air Kubang, Mata Air Mudal;
6.	Tonjong	Mata Air Lame belang, Mata Air Manggang I, Mata Air Manggang II, Mata Air Singkup, Mata Air Jumbleng, Mata Air Guyang, Mata Air Jimat, Mata Air Rajawetan, Mata Air Tlaga Kubang;
7.	Banjarharjo	Mata Air Pangebunan/Cipayo, Mata Air Pangebunan/Pancuran Mas, Mata Air Buadil, Mata Air Cihalimun, Mata Air G. Canggih, Mata Air P. Malaka, Cikadu, Mata Air G. Garang;
8.	Ketanggungan	Mata Air Cipagreret




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 LAMPIRAN PERDA KABUPATEN BREBES NO.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 - 2039
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1:130 000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS84 - Zona 49S

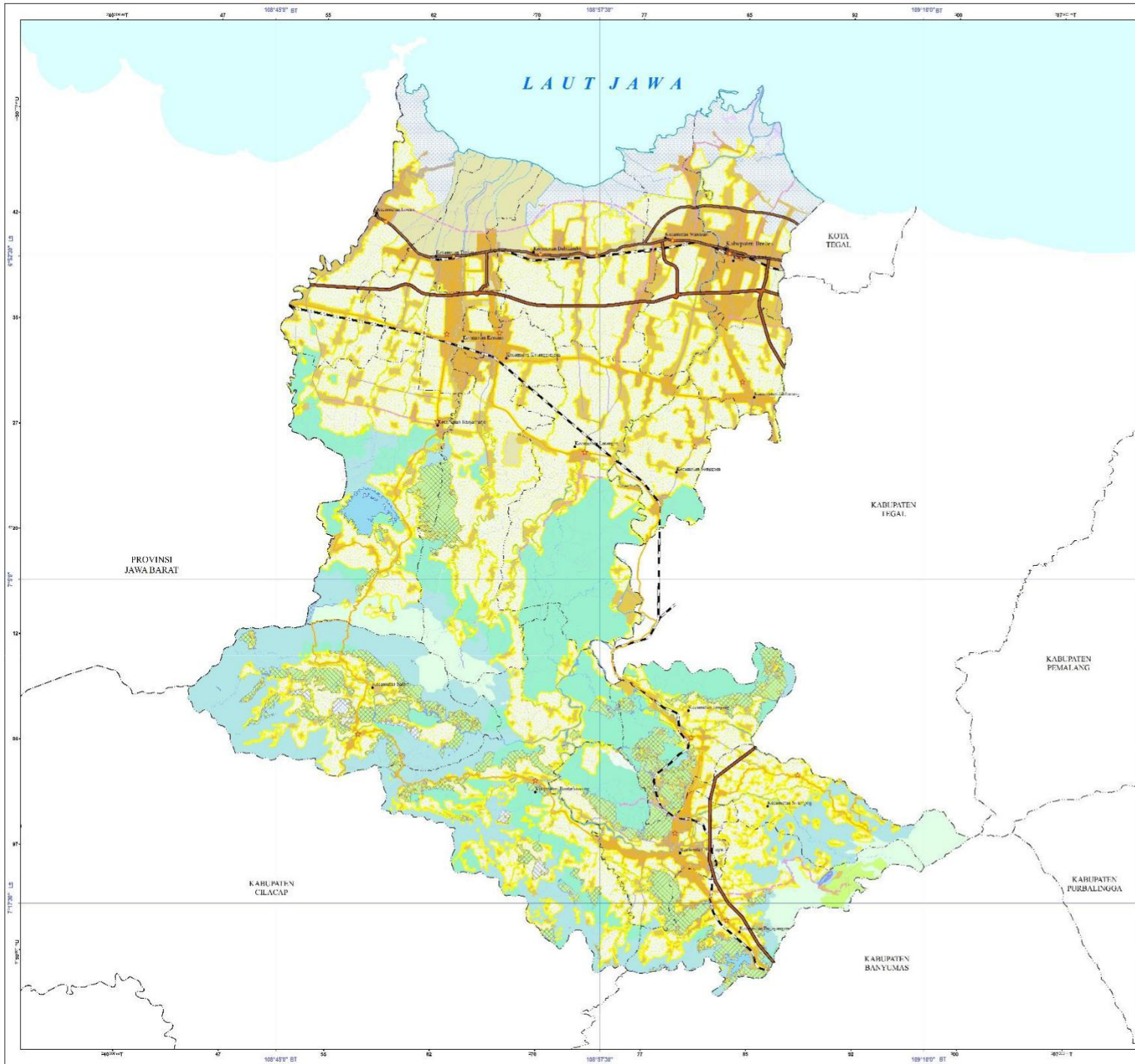


- KETERANGAN**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| IBUKOTA PEMERINTAHAN | BATAS ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Garis Perairan | — Sungai |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | — Waduk |
| | — Batas Kabupaten | |
| | — Batas Kecamatan | |
| | — Batas Desa/Kelurahan | |
- STRUKTUR RUANG :**
- | | |
|--|--|
| PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN | SISTEM JARINGAN ENERGI |
| ○ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | — Jaringan Persebaran Energi - Konvensional |
| △ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | — Jaringan Infrastruktur Ketahanan Energi |
| ▲ Pusat Pelayanan Lingsarung (PPL) | — Infrastruktur Pemangkitan Tenaga Listrik dari Sediaan Pembangkit |
| | — Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) |
| SISTEM JARINGAN JALAN | — Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) |
| — Jalan Arteri Primer | — Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) |
| — Jalan Tol | — Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) |
| — Jalan Koridor Primer Satu (JKP-1) | — Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMHD) |
| — Jalan Koridor Primer Dua (JKP-2) | — Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Sediaan Pendukungnya |
| — Jaringan Jalan Kabupaten | — Jaringan Transmisi Tenaga Listrik |
| — Jalan Lokal Primer | — Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) |
| — Jalan di wilayah Kecamatan | — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTHT) |
| — Jalan Desa | — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |
| | — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) |
| Sistem Jaringan Kereta Api | — Ganda Injak |
| — Jaringan Jalur Kereta Api (JKA) | |
| — Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota | SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI |
| — Terminal Pengumpang | — Jaringan Tetap |
| — Terminal Perumpang Tipe B | — Jaringan Seluler |
| — Terminal Perumpang Tipe C | |
| — Terminal Barang | SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA |
| — Jembatan Timbang | — Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| — Stasiun Kereta Api (KA) | — Jaringan Pengumpulan Air Limbah (IPAL) |
| — Stasiun Perumpang Terpadu | — Instalasi Pengendalian Lumpur Tinja (PLT) |
| — Stasiun Perumpang | — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| — Stasiun Baras | — Sistem Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3B) |
| — Pelabuhan Laut | — Sistem Jaringan Pemertajahan Wilayah |
| — Pelabuhan Pungpan Regional | — Terminal Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) |
| — Pelabuhan Pungpan Lokal | — Terminal Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah |
| | — Terminal Pemrosesan Sementara (TPS) Sampah |
| SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | — Sistem Jaringan Drainase |
| — Sumber Air | — Jaringan Drainase Primer |
| — Waduk | — Jaringan Drainase Sekunder |
| | — Sistem Jaringan Fungsional Rencana |
| | — Jalur Evaluasi Rencana |
| | — Ruang Dilindungi Berencana |

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Berbagai Peta dasar adalah Peta 1:100.000 Skala 1:50.000 tahun 2017
 - Garis perairan menggunakan peta perairan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
 - Saluran transmisi Kabupaten Brebes Berdasarkan PDPRD BCS Tahun 2011, Permenandagri No. 18 Tahun 2006, Permenandagri No. 24 Tahun 2015, Permenandagri No. 2 Tahun 2020, Permenandagri No. 53 Tahun 2011, Permenandagri No. 14 Tahun 2015 dan RRI KSI Tahun 2017
 - Hasil Analisis dan Inventaris RENCANA Kabupaten Brebes, Juli 2017

BUPATI BREBES
 Ttd
IDIZA PRIYANTI




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 LAMPARAN : RENCANA KABUPATEN BREBES NO.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 - 2039

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:130.000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS84 - Zona 49S



- KETERANGAN**
- | | |
|--|--|
| <p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ● Ibu Kota Kecamatan <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Perbatasan --- Salas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai — Waduk | <p>SISTEM JARINGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan Nasional — Jalan Arteri Primer — Jalan Tol — Jalan Koridor Primer Sisa (JKP-1) — Jaringan Jalan Provinsi — Jalan Koridor Primer Dua (JKP-2) — Jaringan Jalan Kabupaten — Jalan Koridor Primer Empat (JKP-4) — Jalan Lokal Primer — Jalan Strategis Kabupaten — Jalan Desa — Sistem Jaringan Kereta Api — Jaringan Jalur Kereta Api (KA) — Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota |
|--|--|

- POLA RUANG :**
- KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Resapan Air
- Kawasan Perlindungan Sempit**
- Sempadan Sungai
 - Sempadan Pantai
 - Kawasan Sekitar Waduk
- Kawasan Konservasi**
- Cagar Alam
 - Kawasan Ekosistem Mangrove
 - Kawasan Ekosistem Mangrove
- KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Tanaman Pangan
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Peternakan
 - Kawasan Perikanan Perikanan Berkelanjutan - KP2B
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan Budaya
 - Kawasan Perikanan Industri
 - Kawasan Perikanan Industri
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perumahan Perumahan
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta RD KSP-Sera : 50.000 Tahun 2017
- dan peta perencanaan peta-peta Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013
- Buku administrasi Kabupaten Brebes Berdasarkan PPDR BKR Tahun 2017, Permenlog No. 19 Tahun 2006, Permenlog No. 32 Tahun 2016, Permenlog No. 2 Tahun 2009, Permenlog No. 66 Tahun 2013, Permenlog No. 7 Tahun 2012 dan REI KSP Tahun 2017
- Hasil Analisis "in" teknis RTWY Kabupaten Brebes Tahun 2016

BUPATI BREBES

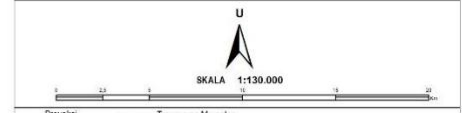
Ttd

IDZA PRIYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 JAMBUAN POKOK KABUPATEN BREBES NO. 11 TAHUN 2019
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 - 2039**

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS84 - Zone 49S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- IBUKOTA PEMERINTAHAN**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Garis Perairan
 - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa/Kelurahan
- PERAIRAN**
 - Sungai
 - Waduk
- SISTEM JARINGAN JALAN**
 - Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Istimewa
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jaringan Jalan Provinsi
 - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Jaringan Jalan Kabupaten
 - Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Strategis Kabupaten
 - Jalan Desa
 - Sistem Jaringan Kereta Api
 - Jaringan Jalan Kereta Api (KA)
 - Stasiun

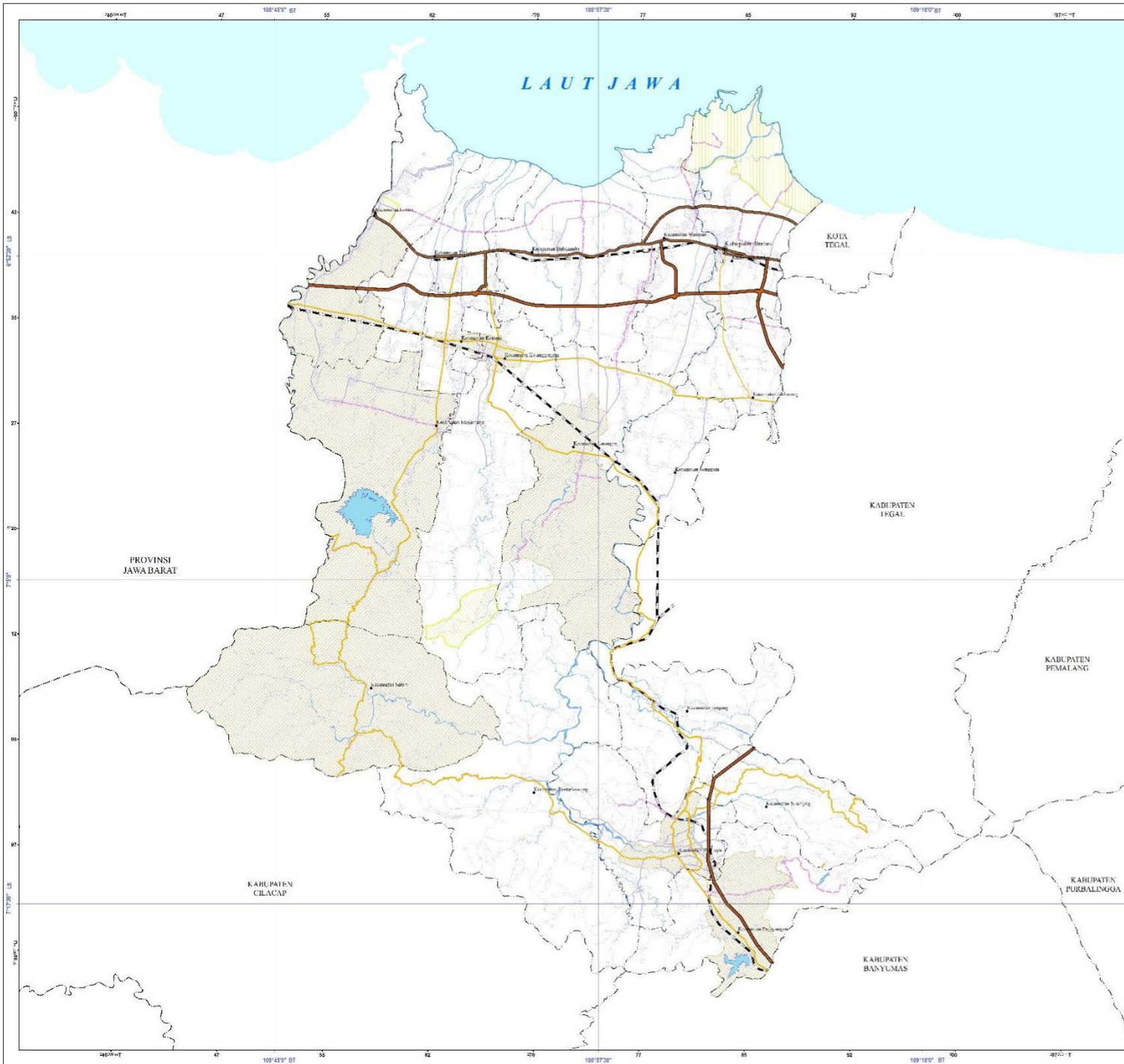
KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan dan Energi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Soleng, Peta dasar adalah Peta RSE KSP Skala 1:50.000 tahun 2017
- Cetak digital menggunakan peta dasar Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
- Batas administratif Kabupaten Brebes Berdasarkan PPBW BIG tahun 2017, Permenlog No. 18 tahun 2006, Permenlog No. 32 tahun 2015, Permenlog No. 2 tahun 2009, Permenlog No. 59 tahun 2013, Permenlog No. 7 tahun 2019 dan RSE KSP tahun 2017.
- Hasil Analisis Tim Teknis RTRW Kabupaten Brebes tahun 2019

BUPATI BREBES
 Ttd
IDZA PRIYANTI





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 JARAN RIBU KABUPATEN BREBES NO.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 - 2039

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U



SKALA 1:130.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS84 - Zona 49S

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Ditetapkan

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Garis Pantai
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Sekelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Waduk

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)

Jaringan Jalan Provinsi

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten

- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Strategis Kabupaten
- Jalan Desa

Sistem Jaringan Kereta Api

- Jaringan Kereta Api (JK)
- Jaringan Kereta Api Amalita

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN :

- Kawasan Strategis Perkotaan Kabupaten
- KSK Perikanan dan Perikanan
- Kawasan Strategis Kabupaten Tegal dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya
- KSK Sosial dan Budaya

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Sebagai Pola dasar adalah Pola RBI KSP Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Cara pemetaan menggunakan garis pantai Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
- Sistem administrasi Kabupaten Brebes berdasarkan PSIR/BIG Tahun 2017, Permenagri No. 13 Tahun 2006, Permenagri No. 32 tahun 2013, Permenagri No. 2 tahun 2019, Permenagri No. 19 tahun 2013, Permenagri No. 2 tahun 2013 dan RTRW Kabupaten Brebes 2017
- Data Arah & "in" teknis RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2015

BUPATI BREBES

Ttd

IDZA PRIYANTI